

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan politik merupakan sebuah proses pembelajaran kajian-kajian politik, pendidikan politik sering kali diadakan untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar dapat melek terhadap kondisi politik. Adapun penyelenggara pendidikan politik biasanya di selenggarakan oleh lembaga yang memang fokus pada kegiatan-kegiatan politik. Sebagaimana halnya penyelenggara pemilu yang memang berfokus terhadap demokrasi tentu saja akan memberikan pemahaman politik untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam ikut serta menyongsong pemilu maupun Pilkada.

Partisipasi masyarakat pada Pilkada di Kabupaten Bandung tahun 2020 memiliki peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilih walaupun belum mencapai target yang ditargetkan KPU Kabupaten Bandung. Tingkat partisipasi masyarakat pada tahun 2020 sebesar 72,18 persen tentu ada peningkatan partisipasi masyarakat dibandingkan pada Pilkada tahun 2015 yang mencapai 62,9 persen.<sup>1</sup> Peningkatan yang terjadi pada Pilkada ini tentunya ada upaya sinergi dari penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek baik itu memilih, mendukung, ikut andil menjadi penyelenggara dan sebagainya.

Penyelenggara pemilu di Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga penyelenggara ini tentunya memiliki fokus yang berbeda dalam menyelenggarakan pemilihan maupun pemilu karena memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Maka dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat berupa pendidikan politik tentunya tidak akan memiliki kesamaan karena memiliki fokus yang berbeda

---

<sup>1</sup> Kab-bandung.kpu.go.id. 15 Desember 2020

Adapun yang akan peneliti bahas pada penelitian ini adalah mengenai pendidikan politik yang diadakan oleh salah satu penyelenggara pemilu yaitu Bawaslu. Dalam menciptakan pendidikan politik, Bawaslu memberikan pendidikan dengan menyelenggarakan salah satu program yang khusus memberikan pemahaman demokrasi, pemilu dan pengawasan. Program ini dinamakan dengan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).

Sekolah yang dimaksud di sini bukanlah sekolah formal pada umumnya yang harus bertahun-tahun lamanya diikuti oleh masyarakat. Melainkan sekolah di sini adalah pelatihan yang diikuti peserta selama beberapa hari. SKPP ini merupakan agenda rutin yang diadakan oleh Bawaslu setiap tahunnya terhitung dari tahun 2019 sampai saat ini masih menjadi pendidikan politik yang dapat diikuti oleh masyarakat. Adapun beberapa tahapan peserta dalam mengikuti SKPP pertama, tingkat kabupaten/kota melakukan pelatihan selama 3 hari. Kedua, tingkat menengah atau provinsi selama 5 hari. Dan yang terakhir tingkat lanjut yang diselenggarakan oleh pusat selama 7 hari lamanya.

Di Kabupaten Bandung sendiri partisipan peserta yang telah mengikuti pendidikan politik yang diadakan oleh Bawaslu ini yaitu SKPP sudah mencapai 298 orang terhitung dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Banyaknya peserta dalam mengikuti kegiatan pendidikan politik ini tentu sedikit besarnya dapat berkontribusi dan bersinergi dengan Bawaslu dalam memahami dan menangani pengawasan pemilihan maupun pemilu. Kegiatan ini diutamakan bagi kalangan milenial khususnya masyarakat yang berusia 20-30 tahun. Hal ini adalah upaya meningkatkan partisipasi anak muda dalam ikut serta di setiap agenda politik khususnya dalam hal pengawasan pemilihan ataupun pemilu. Adapun rekapitulasi partisipan masyarakat kabupaten Bandung dalam mengikuti kegiatan pendidikan politik SKPP adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. 1 Rekapitulasi Partisipan SKPP dari Kabupaten Bandung Sebelum Pilkada Tahun 2020**

<b>Kegiatan</b>	<b>Tahun</b>	<b>Partisipan</b>
SKPP 1	2018	1 orang
SKPP JAWA BARAT	2019	3 orang
SKPP KABUPATEN BANDUNG	2019	90 orang
SKPP DARING KABUPATEN BANDUNG	2020	101 orang
<b>Total</b>		<b>195 orang</b>

*Sumber : Tabel dibuat oleh peneliti*

Sebagaimana pada tabel 1.1 partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan politik yang dilakukan memiliki perkembangan di setiap kegiatan. Tetapi setelah mengikuti pendidikan politik yang diadakan oleh Bawaslu ini yaitu SKPP peserta semaksimal mungkin dapat berkontribusi dalam agenda pemilihan. Pilkada tahun 2020 merupakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bandung. Sehingga pada momentum ini sudah sangat jelas untuk peserta ikut serta berpartisipasi politik dalam Pilkada baik itu memilih, menjadi lembaga pendidikan/sosialisasi terhadap masyarakat untuk memberikan pengetahuan politik mengenai ke pengawasan secara individual ataupun komunal atau ikut berpartisipasi langsung sebagai penyelenggara pemilihan dengan menjadi *ad hoc* Bawaslu. Banyaknya ruang yang dapat dilakukan oleh peserta SKPP setelah mengikuti pendidikan politik untuk berpartisipasi politik dalam cakupan momentum Pilkada. Sebagaimana menurut Ramlan Surbakti (2007) katakan dalam buku memahami ilmu politik ada 3 dimensi yang dapat dilakukan, yaitu : pertama, proses partisipasi, bentuk partisipasi dan kerja sama<sup>2</sup>.

<sup>2</sup>Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo

Relevansinya pendidikan politik dengan ruang aktualisasi ini menjadi suatu permasalahan yang akan dikaji penulis. Dalam ajang sesudah mengikuti pendidikan SKPP, alumni SKPP dapat berpartisipasi politik dalam cakupan yang Ramlan katakan atau hanya sekedar ikut pendidikan politik tanpa adanya partisipasi lainnya. Lantas, seberapa besarkah pengaruh pendidikan politik SKPP itu sendiri terhadap partisipasi politik dalam pengawasan Pilkada di Kabupaten Bandung tahun 2020. Karena kedua variabel tersebut memiliki korelasi dengan yang disampaikan oleh Louis Gottschalk yang mengatakan pengaruh merupakan suatu efek yang dapat menimbulkan suatu *feedback* (timbang balik) baik itu secara pemahaman ataupun perbuatan yang bersifat individual maupun komunal. Sehingga dapat ditinjau bahwasanya segala aktivitas yang dilakukan akan memberikan pengaruh terhadap sesuatu. Adanya pendidikan politik SKPP ini tentu sedikit banyaknya akan memberikan pengaruh terhadap tingkat partisipasi politik baik itu berpartisipasi dalam memilih, ikut andil menjadi penyelenggara ataupun ikut mensosialisasikan.

Dengan demikian, dalam pemaparan di atas sangat menarik perhatian penulis dalam melakukan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhirnya yaitu skripsi. Sehingga penulis akan menulis karya ilmiah ini dengan judul **“PENGARUH PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI POLITIK PESERTA SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF (SKPP) DI KABUPATEN BANDUNG “**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan penjabaran masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh SKPP terhadap partisipasi politik pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis memiliki tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengenai pengaruh antara pendidikan politik pada tingkat partisipasi politik peserta Sekolah Kader Pengawas

Partisipatif (SKPP) pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Bandung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat teoritis**

- a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Jurusan Ilmu Politik
- b. Sebagai implementasi dari teori yang telah dikaji terhadap realitas dan fakta yang terjadi dimasyarakat dalam kajian Ilmu Politik.
- c. Sebagai referensi penelitian dan kajian ilmu pengetahuan di bidang politik.

##### **2. Kegunaan praktis**

- a. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai bentuk bukti yang dilakukan oleh peneliti dalam menyelesaikan pendidikan strata 1 di jurusan Ilmu Politik.
- b. Bagi instansi, sebagai rekomendasi dan evaluasi dalam mengembangkan penanaman pendidikan politik untuk terus memberikan pengaruh yang signifikan.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan informasi untuk menggali temuan penelitian baru yang lebih akurat.

#### **E. Hipotesis**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang dipaparkan, bentuk rumusan masalah yang digunakan adalah rumusan masalah hubungan (*assosiatif*). Sugiyono menjelaskan bentuk *assosiasif* merupakan suatu bentuk jawaban dugaan sementara yang memaparkan mengenai hubungan dua atau lebih variabel.<sup>3</sup> Berdasarkan pada kerangka penelitian yang telah di paparkan di atas, maka menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : PT. Alfabet

Ho : Tidak adanya pengaruh yang signifikan dan positif antara pendidikan politik terhadap tingkat partisipasi politik peserta SKPP di Kabupaten Bandung.

Ha : Adanya pengaruh yang signifikan dan positif antara pendidikan politik terhadap tingkat partisipasi politik peserta SKPP di Kabupaten Bandung.

